

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Kabupaten Deli Serdang



LKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 yang mengacu pada Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 merupakan laporan hasil kegiatan yang telah dikerjakan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, serta masalah dan solusi yang diambil Badan Pendapatan Daerah dalam satu tahun anggaran, sekaligus merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2023.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lubuk Pakam,
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Drs. HENDRA WIJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691213 199010 1 002**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 yang mengacu pada Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 merupakan laporan hasil kegiatan yang telah dikerjakan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, serta masalah dan solusi yang diambil Badan Pendapatan Daerah dalam satu tahun anggaran, sekaligus merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2023.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lubuk Pakam,

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**



**Drs. HENDRA WIJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19691213 199010 1 002



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	5
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	7
1.2.2 Aspek Strategis	18
1.2.3 Anggaran	19
1.3 Dasar Hukum	19
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	21
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	24
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja	30
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	30
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	31
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	35
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	37
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota	38
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ...	39
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	45
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja	47
3.2 Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP.....	55
LAMPIRAN	57



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan tahun 2023	19
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Periode 2019-2024	22
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023	23
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023	24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023	25
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023	25
Tabel 2.6 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023	27
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	30
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	31
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023	32
Tabel 3.4 Indeks Kepuasan Masyarakat per Unit Pelayanan.....	34
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja.....	35
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Capaian Pajak Daerah Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	36
Tabel 3.7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	37
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Deli Serdang	38
Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	39
Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	45
Tabel 3.11 Tabel Efisiensi Keuangan Daerah Otonomi.....	46
Tabel 3.12 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	48
Tabel 3.13 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	54



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	7



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dan anggaran pemerintah daerah, maka daerah dituntut untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari SAKIP, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Pendapatan Daerah :



1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Deli Serdang. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang dalam menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Deli Serdang.

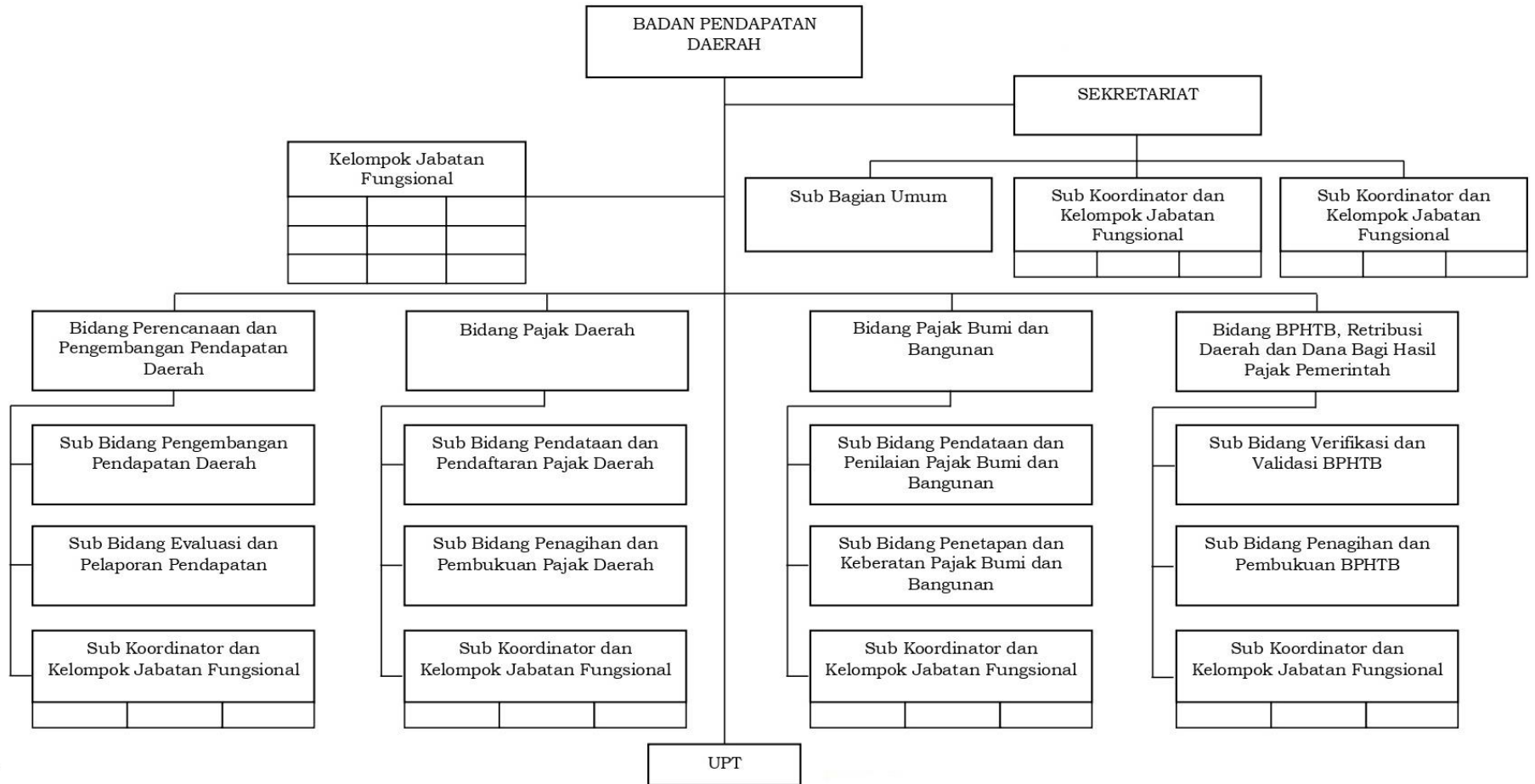
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan teknis bidang keuangan terkait Pendapatan Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Sumber Data : Perbup Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Tupoksi Badan Pendapatan Daerah



1. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendapatan Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas :

1. Menetapkan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
2. Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pedapatan Daerah serta perubahannya;
3. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Daerah, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah serta Unit Pelaksana Teknis;
4. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
5. Menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
6. Menetapkan Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
7. Menetapkan verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
8. Menetapkan Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
9. Menetapkan Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak atau Denda Administrasi;
10. Memonitor dan evaluasi perkembangan penerimaan pendapatan daerah;
11. Mengoordinasikan penyusunan APBD di bidang pendapatan daerah dengan instansi terkait;
12. Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Aset Badan;
13. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan;
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



2. Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
2. Pelaksanaan tugas Sekretariat Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
3. Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat;
4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;
2. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;
5. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
6. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK) Daftar Urut Kependudukan (DUK) Badan Pendapatan Daerah;
7. Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;
8. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
2. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Badan;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

4. Melaksanakan pengelolaan aset Badan;
5. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama dan kehumasan, arsip dan dokumen pada Badan;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
7. Menyusun rencana dan agenda Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;
8. Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
9. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan, serta penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), dan Analisis Beban Kerja (ABK) Aparatur Sipil Negara pada Badan;
10. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Umum;
11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
2. Merumuskan kajian teknis perencanaan potensi pendapatan daerah;
3. Merumuskan produk hukum pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
4. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
5. Melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
6. Mengevaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

7. Melakukan evaluasi realisasi pendapatan daerah;
8. Mengoordinasikan data evaluasi pendapatan daerah yang telah diawasi dalam rangka pemeriksaan pendapatan daerah dengan bidang terkait;
9. Melaksanakan pelaporan realisasi dan tunggakan pendapatan daerah;
10. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
11. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Menyusun bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
3. Menyusun data koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber-sumber pendapatan;
4. Menyusun kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
5. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
6. Menyusun data hasil pengawasan pemungutan pendapatan daerah;
7. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

2. Menyusun bahan pelaporan realisasi pendapatan;
3. Menyusun data tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang disampaikan dari bidang terkait;
4. Menyusun data evaluasi dan koordinasi pendapatan daerah;
5. Menyusun data evaluasi penerimaan daerah yang belum tertagih untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun data evaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;
7. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pajak Daerah;
2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pajak Daerah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pajak Daerah.

Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
2. Merumuskan Pajak Daerah;
3. Memvalidasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
4. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
5. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
6. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Daerah atau Denda Administrasi;
7. Mengoordinasikan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak pajak;



8. Mengoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak daerah dengan bidang terkait;
9. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan pendaftaran;
10. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan, keberatan, pembatalan dan angsuran;
11. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pajak Daerah;
12. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pajak Daerah;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Kepala Sub Bidang Pendataan Dan Pendaftaran Pajak Daerah mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
2. Meneliti formulir pendaftaran, SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak;
3. Meneliti data formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib pajak;
4. Melaksanakan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
5. Menyusun daftar induk wajib pajak dan menerbitkan NPWPD;
6. Menyusun data hasil pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah;
7. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Kepala Sub Bidang Penagihan Dan Pembukuan Pajak Daerah mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan tunggakan pajak daerah;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi pajak daerah;
4. Meneliti data permohonan banding, penghapusan atau pengurangan, dan restitusi pajak daerah;
5. Menyusun data untuk pemeriksaan pajak daerah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;



6. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan tunggakan pajak daerah;
7. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
8. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Kepala Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan;
2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Memvalidasi pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
3. Memvalidasi penetapan objek pajak bumi dan bangunan;
4. Mengoordinasikan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak pajak bumi dan bangunan;
5. Memvalidasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
6. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau Denda Administrasi;
9. Mengoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dengan bidang terkait;
10. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian, penetapan dan keberatan serta penagihan pajak bumi dan bangunan;
11. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan



16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

11. Kepala Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
3. Meneliti formulir /SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak;
4. Meneliti data formulir/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib pajak bumi dan bangunan;
5. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan di lapangan;
6. Menyusun penilaian objek pajak bumi dan bangunan.
7. Melaksanakan entry data hasil pelayanan pajak bumi dan bangunan dan perubahan peta;
8. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

12. Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan pajak bumi dan bangunan;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, pembatalan dan angsuran pajak bumi dan bangunan;
4. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
5. Menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran;
6. Menyusun data informasi objek dan subjek penetapan pajak bumi dan bangunan;
7. Meneliti data permohonan keberatan, angsuran dan pembatalan SPPT PBB;



8. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

13. Kepala Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
2. Penyiapan bahan koordinasi dalam Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah

Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
2. Memvalidasi dan verifikasi pembayaran BPHTB;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
4. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Restitusi BPHTB;
5. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan atau Pembatalan BPHTB;
6. Mengoordinasikan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak atau kurang bayar BPHTB;
7. Mengoordinasikan pembukuan realisasi dan tunggakan BPHTB dengan bidang terkait;
8. Melaksanakan kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
9. Mengoordinasikan penetapan anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak dengan Pemerintah Provinsi;
10. Mengoordinasikan pembukuan data realisasi retribusi daerah dengan bidang terkait;
11. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;



12. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

14. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
3. Meneliti data dalam surat setoran BPHTB dengan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan;
4. Menyusun data pembayaran BPHTB yang perlu dilakukan validasi lapangan;
5. Menyusun data dan informasi verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
6. Menyusun kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
7. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

15. Kepala Sub Bidang Penagihan Dan Pembukuan BPHTB mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan BPHTB yang belum atau kurang bayar;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
4. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan BPHTB;
5. Meneliti permohonan keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
6. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan BPHTB;
7. Menyusun data Surat Setoran BPHTB per bulan sesuai penerimaan rekening koran pada bank persepsi;
8. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;



9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.2.2 Aspek Strategis

Kemandirian suatu daerah untuk membangun daerahnya melahirkan strategi-strategi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sumber-sumber keuangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, baik dari sektor pajak maupun retribusi. Arah kebijakan yang ditempuh sebagai strategi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, terintegrasi dan sinergi melalui inovasi dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel. Pendapatan daerah memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Peran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk mewujudkan pembangunan Deli Serdang yang maju dan sejahtera sangat signifikan mengingat Badan Pendapatan Daerah sebagai OPD fungsi keuangan terkait pendapatan daerah untuk mencari sumber-sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Strategi peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak daerah merupakan strategi yang diterapkan guna peningkatan penerimaan pajak daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah nantinya diharapkan bahwa pemerintah daerah secara bertahap dapat mengurangi ketergantungannya dari pemerintah pusat dan propinsi. Peran strategis Bapenda untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan pajak dan retribusi daerah.
2. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan di luar pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.
3. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah penghasil pendapatan daerah.
4. Pemanfaatan data, sistem informasi yang berbasis teknologi informasi untuk peningkatan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah.



1.2.3 Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bapenda membutuhkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber (1)	Tahun (2)	Jumlah (3)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
APBD	Tahun 2022	Rp. 60.076.519.721,-	Rp. 60.644.468.044,-
APBD	Tahun 2023	Rp. 60.031.468.044,-	Rp. 63.224.358.779,-
Sumber Lainnya (jika ada)		Rp. -	Rp. -

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang



1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan latar belakang penyusunan LKIP, struktur organisasi dan tata kerja, uraian tugas dan fungsi Bapenda, aspek strategis organisasi, anggaran dan sumber dana, dasar hukum serta sistematika laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang perencanaan kinerja seperti tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja dan perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang :

- **Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan capaian kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah. Tujuan juga merupakan akhir yang ingin dicapai atau hasil yang ingin dicapai atau dihasilkan di masa yang akan datang, yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengatur penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penyusunannya didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam RPJMD 2019 – 2024 disebutkan Visi Kabupaten Deli Serdang adalah :

“Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam ke Bhinekaan”.

Dengan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.



4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan terkait pendapatan daerah, dalam hal ini mengemban misi ke-2 yaitu *"Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif"*.

Tujuan organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah dengan masing-masing sasarannya. Berikut indikator kinerja dan target kinerja tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 - 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target		
						2022	2023	2024
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)			Triliun Rupiah	146,04	159,77	173,5
			Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	%	100	100	100
2	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Poin	71,69	75,47	77,35
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	79	80	81
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	70,01	71,00	72,00

Sumber : Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2019-2024



Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	1.1 Persentase penerimaan pajak daerah	Persentase	Perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target pajak daerah yang ditetapkan. Untuk memastikan bahwa target penerimaan pajak daerah dapat tercapai agar program/kegiatan Kabupaten Deli Serdang yang telah direncanakan pada APBD dapat dilaksanakan seluruhnya. Dengan acuan target pajak daerah pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan kebutuhan belanja daerah yang juga meningkat setiap tahun, sebagai salah satu sumber pendanaan APBD Kabupaten Deli Serdang diharapkan realisasi pajak daerah juga mengalami kenaikan capaian setiap tahunnya.	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Nilai pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	
		2.2 Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	Evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja	Nilai LHE AKIP dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	

Sumber : IKU (Indikator Kinerja Utama) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang



2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat didalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut rencana kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)			Triliun Rupiah	159,77
			Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	%	100
2	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Poin	75,47
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	71,00

Sumber : Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pertunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (top level manager) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (middle level manager), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Melalui perjanjian kinerja, maka akan terwujud komitmen untuk mencapai kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK ini juga merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Berikut perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 :



Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 poin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	71 poin

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	76 Poin
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	2 Sub Kegiatan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
I.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	3 Sub Kegiatan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	1680 OB
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130 Dokumen
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Poin
II.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	1 Sub Kegiatan
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

	Atribut Kelengkapannya	Kelengkapannya	
II.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	7 Sub Kegiatan
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4020 Dokumen
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan
II.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	3 Sub Kegiatan
1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	154 Unit
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit
II.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	4 Sub Kegiatan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	375 Laporan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	98 Laporan
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	42 Laporan
II.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	3 Sub Kegiatan
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit
III	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100 persen
III.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	14 Sub Kegiatan
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10 Dokumen
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan
4.	Peyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	33 Unit
5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	17430 Laporan
6.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolaha, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan
7.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2500 OP
8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	456587 Dokumen
9.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	63560 Layanan
10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	56883 Dokumen
11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	505617 Dokumen
12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	30 Dokumen
13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	18051 Dokumen
14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	384 Laporan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Tabel 2.6 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	71 Poin
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	2 Sub Kegiatan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
I.1	Administrasi Keuangan	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	3 Sub Kegiatan



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

	Perangkat Daerah		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	1470 OB
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130 Dokumen
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Poin
II.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	1 Sub Kegiatan
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
II.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	7 Sub Kegiatan
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4020 Dokumen
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan
II.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	3 Sub Kegiatan
1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	158 Unit
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit
II.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	4 Sub Kegiatan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	104 Laporan
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan
II.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	3 Sub Kegiatan



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit
III	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100 persen
III.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	14 Sub Kegiatan
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10 Dokumen
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	18 Laporan
4.	Peyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	33 Unit
5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	17430 Laporan
6.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolaha, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	20725 Laporan
7.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2500 OP
8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	456587 Dokumen
9.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	63560 Layanan
10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	56883 Dokumen
11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	505617 Dokumen
12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	30 Dokumen
13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	18051 Dokumen
14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	384 Laporan
15.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Badan Pendapatan Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Hasil Pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100%	62,91%	62,91 %	Rendah	Laporan Bendahara Penerimaan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 poin	81,87 poin	102,34 %	Sangat tinggi	Laporan IKM Bapenda
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	71 poin	70,91 poin	99,87%	Sangat tinggi	Laporan Hasil Evaluasi Sakip Bapenda
Rata-rata % Capaian					88,37 %	Tinggi	

Sumber : Laporan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Jika dilihat dari tabel di atas, rata-rata persentase capaian sasaran strategis termasuk dalam kategori tinggi yaitu :

1. Sasaran strategis : meningkatnya penerimaan pajak daerah, dengan acuan target pajak daerah pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka realisasi pajak daerah juga diharapkan mengalami kenaikan capaian setiap tahun. Namun capaian kinerja sasaran ini hanya tercapai 62,91% dari target yang telah ditetapkan.

Indikator sasarannya : persentase penerimaan pajak daerah. Indikator tersebut digunakan untuk memastikan bahwa persentase penerimaan pajak daerah dapat tercapai, agar program/kegiatan Kabupaten Deli Serdang yang telah direncanakan pada tahun 2023 dapat dilaksanakan seluruhnya terutama untuk belanja daerah yang bersumber dari pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut :



Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan Pajak Daerah	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	10.000.000.000,00	9.093.789.233,00	90,94
2	Pajak Restoran	49.142.500.000,00	43.622.306.334,00	88,77
3	Pajak Hiburan	9.980.000.000,00	8.320.462.550,00	83,37
4	Pajak Reklame	20.125.000.000,00	11.364.920.136,00	56,47
5	Pajak Penerangan Jalan	295.000.000.000,00	213.042.327.681,00	72,22
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	16.000.000.000,00	2.564.438.695,00	16,03
7	Pajak Parkir	18.345.000.000,00	11.309.022.817,00	61,65
8	Pajak Air Tanah	20.700.000.000,00	10.579.516.910,00	51,11
9	Pajak Sarang Burung Walet	3.086.250.000,00	7.100.000,00	0,23
10	PBB Perkotaan dan Pedesaan	565.704.443.305,00	220.558.219.773,00	38,99
	- Pokok Tahun Berjalan	302.485.171.250,00	194.896.753.949,00	64,43
	- Pokok Piutang	263.219.272.055,00	25.661.465.824,00	9,75
11	Pajak BPHTB	260.000.000.000,00	267.272.114.049,00	102,80
	JUMLAH	1.268.083.193.305,00	797.734.218.178,00	62,91
	Lain-lain PAD yang Sah	7.000.000.000,00	3.965.292.788,22	56,65
	JUMLAH KESELURUHAN	1.275.083.193.305,00	801.699.510.966,22	62,87

- 1) Pajak Hotel dari target Rp. 10.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.9.093.789.233,- atau sebesar 90,94% dari target.
- 2) Pajak Restoran dari target Rp. 49.142.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.43.622.306.334,- atau sebesar 88,77% dari target.
- 3) Pajak Hiburan dari target Rp. 9.980.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.8.320.462.550,- atau sebesar 83,37% dari target.
- 4) Pajak Reklame dari target Rp. 20.125.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.11.364.920.136,- atau sebesar 56,47% dari target.
- 5) Pajak Penerangan Jalan dari target Rp. 295.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.213.042.327.681,- atau sebesar 72,22% dari target.



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target Rp. 16.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.564.438.695,- atau sebesar 16,03% dari target.
- 7) Pajak Parkir dari target Rp. 18.345.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.11.309.022.817,- atau sebesar 61,65% dari target.
- 8) Pajak Air Tanah dari target Rp. 20.700.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.10.579.516.910,- atau sebesar 51,11% dari target.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet dari target Rp. 3.086.250.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.7.100.000,- atau sebesar 0,23 % dari target.
- 10) Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan dari target Rp. 565.704.443.305,- dapat terealisasi sebesar Rp. 220.558.219.773,- atau sebesar 38,99% dari target. Dengan realisasi pokok PBB tahun berjalan sebesar 64,43% dan pokok piutang PBB sebesar 9,75%.
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target Rp.260.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 267.272.114.049,- atau sebesar 102,80% dari target.

Pada tahun 2023, dapat dilihat bahwa jumlah capaian realisasi pajak daerah sebesar 62,91% dari target yang direncanakan sebesar 100%. Dengan capaian masing-masing pajak daerah ada yang melampaui target, ada juga yang tidak tercapai. Hasil pengukuran kinerja untuk masing-masing rincian jenis pajak dapat diketahui bahwa jenis pajak Pajak BPHTB memiliki capaian kinerja di atas 100% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk jenis pajak lain capaian kerjanya bervariasi dan belum memenuhi target. Dengan jumlah capaian nilai pajak tertinggi bersumber dari penerimaan pajak BPHTB sebesar Rp. 267.272.114.049,- (*dua ratus enam puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus empat belas ribu empat puluh sembilan rupiah*).

2. Capaian kinerja sasaran strategis ke-2 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah.
 - Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai 102,34 % dengan kategori sangat tinggi. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan teknik pemberian questioner kepada pengguna layanan pajak daerah, baik dengan pengisian sendiri maupun dengan wawancara tatap muka secara kunjungan ke perusahaan atau tempat usaha dan di Kantor UPT pelayanan pajak daerah wilayah kecamatan se Kabupaten Deli Serdang. Survei dilaksanakan setiap triwulan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.4 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Bapenda

No	Periode Penilaian	Nilai IKM
1	Triwulan I	81,07 Poin
2	Triwulan II	81,14 Poin
3	Triwulan III	80,25 Poin
4	Triwulan IV	85,00 Poin
	Nilai IKM Tahun 2023	81,87 Poin

Mayoritas masyarakat pengguna layanan menilai prosedur pelayanan dinilai mudah, persyaratan pelayanan dinilai sesuai, kecepatan pelayanan dinilai cepat, kesesuaian biaya/tarif dinilai gratis, ketepatan produk pelayanan dinilai sesuai, kemampuan/kompetensi dinilai kompeten, kesopanan dan keramahan pelayanan dinilai sopan dan ramah, serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan dinilai baik.

- Indikator sasaran ke-2 Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah tercapai 99,87% dengan kategori tinggi. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang selaku evaluator. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya.



3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 dan tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	56,58%	63,89%	100%	62,91%	62,91 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,02 poin	80,03 poin	80 poin	81,87 poin	102,34%
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	67,57 poin	60,15 poin	71 poin	70,91 poin	99,87%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

1. Pada sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah, persentase capaian sarannya pada tahun 2023 sebesar 62,91% lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 selisih sebesar 0,98%, tetapi jika dibandingkan tahun 2021 lebih tinggi capaiannya sebesar 6,33%. Dapat dilihat dari masing-masing capaian pajak daerah sebagai berikut :



Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Capaian Pajak Daerah Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 Setelah Perubahan			Tahun Anggaran 2022 Setelah Perubahan			Tahun Anggaran 2023 Setelah Perubahan		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	7.647.975.000	4.568.731.781	59,74	8.247.975.000	5.997.886.543,00	72,72	10.000.000.000	9.093.789.233	90,94
2	Pajak Restoran	38.000.000.000	21.692.359.275	57,09	38.750.000.000	35.612.706.786,00	91,90	49.142.500.000	43.622.306.334	88,77
3	Pajak Hiburan	4.000.000.000	1.451.776.607	36,29	5.200.000.000	6.231.245.474,00	119,83	9.980.000.000	8.320.462.550	83,37
4	Pajak Reklame	15.000.000.000	10.996.152.449	73,31	17.500.000.000	11.283.642.306,00	64,48	20.125.000.000	11.364.920.136	56,47
5	Pajak Penerangan Jalan	295.105.000.000	183.793.206.292	62,28	295.105.000.000	203.334.563.003,00	68,90	295.000.000.000	213.042.327.681	72,22
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	36.000.000.000	5.182.008.132	14,39	30.000.000.000	1.042.473.810,00	3,47	16.000.000.000	2.564.438.695	16,03
7	Pajak Parkir	11.000.000.000	4.111.433.217	37,38	13.000.000.000	6.645.503.456,00	51,12	18.345.000.000	11.309.022.817	61,65
8	Pajak Air Tanah	19.000.000.000	6.390.450.844	33,63	18.000.000.000	22.128.115.376,40	122,93	20.700.000.000	10.579.516.910	51,11
9	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	17.700.000	35,40	75.000.000	10.600.000,00	13,47	3.086.250.000	7.100.000	0,23
10	PBB Perkotaan dan Pedesaan	512.719.272.055	192.217.130.174	37,49	507.219.272.055	217.210.595.465,00	42,82	565.704.443.305	220.558.219.773	38,99
11	Pajak BPHTB	250.000.000.000	242.041.888.735	96,82	268.500.000.000	258.172.195.926,00	96,15	260.000.000.000	267.272.114.049	102,80
	JUMLAH	1.188.522.247.055	672.462.837.506	56,58	1.201.597.247.055	767.669.528.145,40	63,89	1.268.083.193.305	797.734.218.178	62,91

Nilai capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 62,91% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 797.734.218.178,-

Nilai capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 63,89 % dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 767.669.528.145,40,-

Nilai capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 56,58 % dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 672.462.837.506,-

Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 secara persentase mengalami penurunan sebesar 0,98%, tetapi jumlah penerimaan pajaknya mengalami kenaikan 3,92% sebesar Rp. 30.064.690.032,60 (*tiga puluh milyar enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga puluh dua koma enam puluh rupiah*). Jika dibandingkan tahun 2021 mengalami kenaikan persentase sebesar 6,33% dengan jumlah kenaikan pajaknya 18,77% sebesar Rp. 126.271.380.672,- (*seratus dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*).



2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah dengan indikator :
- Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian tahun 2023 sebesar 81,87 poin lebih besar dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 80,03 poin, ada peningkatan capaian sebesar 1,84 poin. Juga jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaiannya sebesar 79,02 poin, lebih besar pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,85 poin.
 - Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah capaian tahun 2023 sebesar 70,91 poin lebih besar dibandingkan tahun 2022 dengan capaian sebesar 60,15 poin mengalami kenaikan sebesar 10,76 poin. Juga lebih besar jika dibandingkan tahun 2021 dengan capaian sebesar 67,57 poin, tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,34 poin.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Periode 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5 *100
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	62,91%	100%	62,91
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,87 poin	81,00 poin	101,07
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70,91 poin	72,00 poin	98,48

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

1. Sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah, dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 100% , tingkat kemajuan tahun 2023 baru mencapai 62,91 %.
2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah dengan indikator :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 81 poin tingkat kemajuan tahun 2023 sudah mencapai 101,07%.



- Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 72 poin tingkat kemajuan tahun 2023 baru mencapai 98,48%.

3.1.5 Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Deli Serdang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Kabupaten	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	62,91%	100%	62,91%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,87 poin	88,50 poin	92,51%
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70,91 poin	71,21 poin	99,58 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Disebabkan tidak adanya standar nasional yang mengatur terhadap sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah, maka realisasi kinerjanya hanya bisa dibandingkan dengan standar Kabupaten Deli Serdang berupa nilai capaian Kabupaten untuk tahun 2023.

1. Sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah, Kabupaten Deli Serdang tidak menetapkan standar tetapi menerapkan persentase penerimaan pajak daerah tercapai 100% agar program/kegiatan yang telah direncanakan pada APBD 2023 dapat dilaksanakan seluruhnya terutama yang menggunakan sumber dana dari penerimaan PAD. Tetapi persen capaiannya tahun 2023 hanya mencapai 62,91%.
2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah :
 - Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), nilai IKM Kabupaten sebesar 88,50 poin jika dibandingkan nilai IKM Badan Pendapatan Daerah sebesar 81,87 poin maka persentase capaian Bapenda sebesar 92,51%.
 - Indikator nilai LHE AKIP, nilai AKIP Kabupaten sebesar 71,21 poin jika dibandingkan nilai LHE AKIP Badan Pendapatan Daerah sebesar 70,91 poin maka persentase capaian Bapenda sebesar 99,58%.



3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100%	62,91%	62,91%	<p>Belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah.</p> <p>Kesadaran wajib pajak masih kurang.</p> <p>Belum adanya reward dan punishment bagi wajib pajak.</p> <p>Penagihan piutang masih belum maksimal.</p>	<p>Pendataan potensi di kecamatan dengan aplikasi e-PADI, dan pemeriksaan objek pajak di kecamatan.</p> <p>Kegiatan pembuatan dan pemanfaatan peta bidang ZNT PBB dengan BPN.</p> <p>Melaksanakan kegiatan door to door pemungutan PBB ke desa-desa dan dusun-dusun.</p> <p>Pengaktifan kembali alat rekam data transaksi (tapping box) dan penambahan unitnya.</p> <p>Spanduk himbuan pembayaran pajak daerah.</p> <p>Sosialisasi / penyuluhan dan edukasi melalui tatap muka, media massa dan elektronik.</p> <p>Penyampaian surat pemberitahuan tunggakan pajak daerah.</p> <p>Penerapan denda atas keterlambatan pembayaran pajak daerah.</p> <p>Penempelan stiker di objek pajak : stiker belum bayar pajak (reklame,restoran,PBB), sanksi pembongkaran objek reklame.</p> <p>Stimulus keringanan pelunasan pajak tanpa denda dan perpanjangan jatuh tempo.</p> <p>Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Deli Serdang/Cabang Kejari Labuhan Batu dan Pancur Batu dalam hal penagihan tunggakan pajak daerah.</p> <p>KSWP dengan Dinas PMPTSP untuk penagihan PBB.</p>



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

						Data subjek dan objek pajak belum akurat.	Verifikasi dan validasi PBB dari UPT Bapend di kecamatan. Pemeliharaan basis data PBB (penghapusbukuan piutang).
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 poin	81,87 poin	102,34 %	Rendahnya kualitas pelayanan online.	Pengembangan aplikasi terintegrasi, pelaporan online, pembayaran virtual account.
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	71 poin	70,91 poin	99,87 %	Masih kurangnya perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja internal.	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja internal.

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Penyebab tidak tercapainya sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah, dengan persentase penerimaan pajak daerah sebesar 62,91 % sebagai berikut :

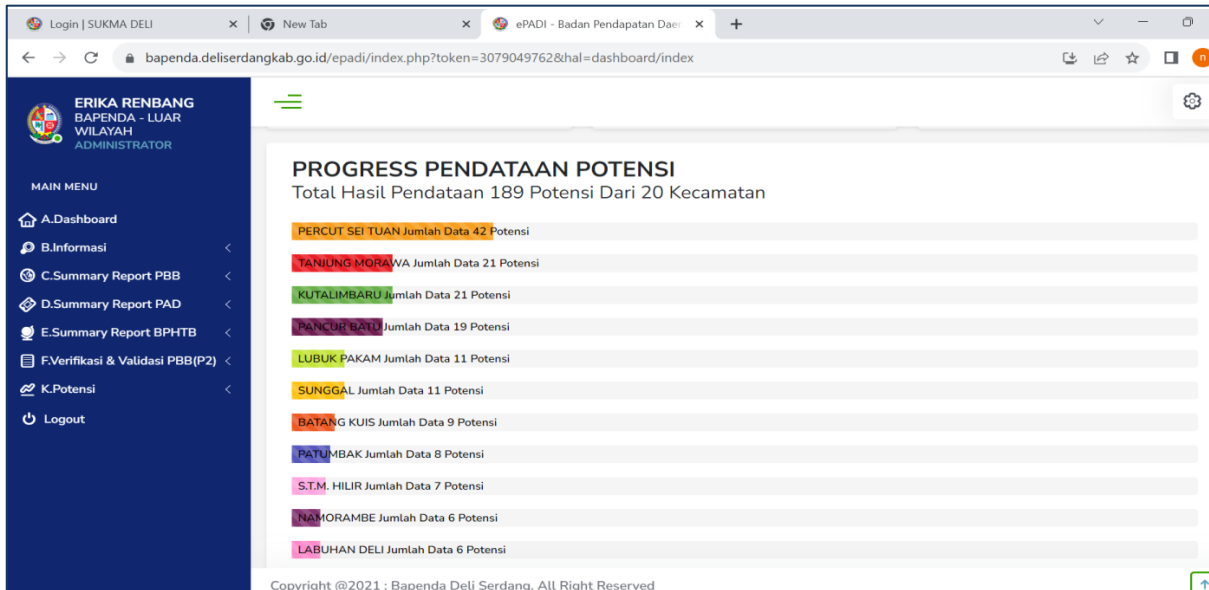
1. Belum tergalinya semua potensi pajak daerah, ada beberapa potensi yang belum terdaftar sebagai wajib pajak;
2. Kesadaran wajib pajak masih kurang (laporan omset/pemakaian belum sesuai, hutang pajak belum dibayar, menolak pemasangan tapping box, pembiaran stiker dan spanduk himbauan);
3. Di era digital ini, banyak produk yang mengiklankan produknya melalui media sosial/iklan digital dan elektronik karena memiliki jangkauan yang lebih luas, sehingga papan reklame jenis billboard dan baliho sangat berkurang.
4. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PLN tanpa dilampirkan rincian pembayaran listrik per pelanggan, sehingga tidak diketahui pelanggan yang belum atau sudah disetorkan PPJ nya oleh PLN.
5. Banyaknya pengusaha mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin pertambangan yang dilakukan secara ilegal dan insidental, dan tidak adanya kepastian hukum apakah yang tidak memiliki izin dapat ditagih pajaknya atau tidak.
6. Realisasi pajak parkir sebagiannya diperoleh dari penyelenggaraan tempat parkir yang tidak melakukan pemungutan pembayaran (parkir gratis) seperti: Indomaret, Alfamart, Alfamidi, BRI, Bank Sumut sehingga perhitungan besar pajak parkir sesuai perda belum dapat optimal.
7. Pemilik usaha sarang burung walet sulit ditemui keberadaannya dan masa panen yang tidak diketahui waktunya.
8. Belum adanya reward dan punishment bagi wajib pajak (hanya penerapan sanksi sosial dan denda, belum ada sanksi hukum yang tegas);
9. Pengelolaan dan penagihan piutang masih belum maksimal;
10. Data subjek dan objek pajak belum akurat (alamat WP, luas tanah/bangunan)



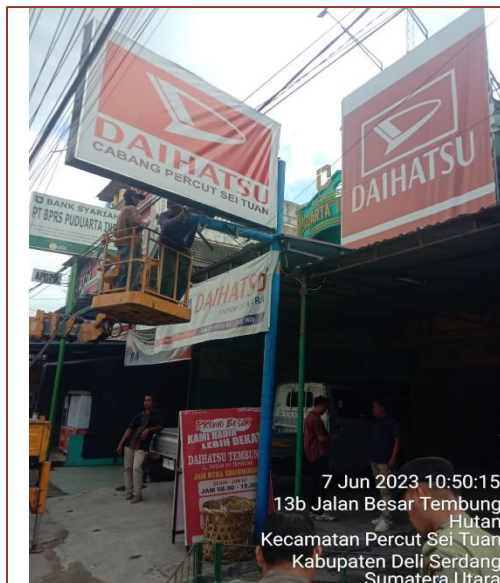
LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Berbagai upaya dan solusi telah dilakukan untuk mencapai target sasaran tersebut antara lain :

1. Melakukan pemutakhiran data dengan pendataan potensi Pajak Daerah melalui aplikasi terintegrasi yang dilaksanakan petugas Bapenda Kabupaten Deli Serdang terutama oleh Petugas Lapangan di UPT Wilayah Kecamatan dengan cara menginput data potensi ke e-PADI web.

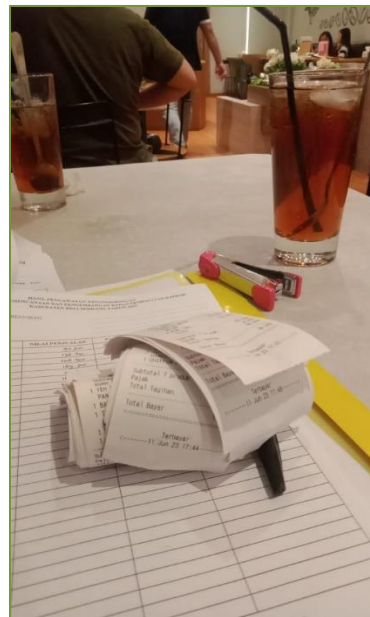


2. Pemeliharaan basis data dengan upaya penanganan piutang PBB-P2 dengan penghapusan buku piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria berdasarkan tindaklanjut Verifikasi dan Validasi Basis Data Piutang PBB-P2 terhadap objek pajak Kategori I Tahun Anggaran 2018.
3. Melakukan penegakan hukum dan sanksi sosial bagi wajib pajak penunggak melalui penempelan stiker serta pembongkaran reklame.





- Melaksanakan pemantauan kepatuhan wajib pajak dengan kegiatan penongkrongan di objek pajak daerah. Objek pajak restoran yang sudah dipasang alat rekam tapping box juga termasuk dalam daftar objek pajak yang dilakukan pemantauan.



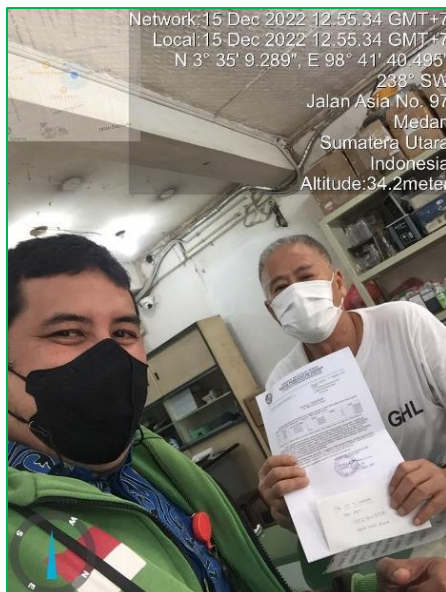


LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

5. Melakukan pengawasan melalui pemasangan dan penambahan alat rekam data transaksi online/tapping box pada wajib pajak. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan survei terhadap objek pajak sebelum pemasangan alat rekam tapping box :



6. Penyampaian surat pemberitahuan tunggakan pajak.





LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

- Melakukan penagihan aktif ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pendataan PBB adanya penambahan bangunan. Dengan dokumentasi sebagai berikut :

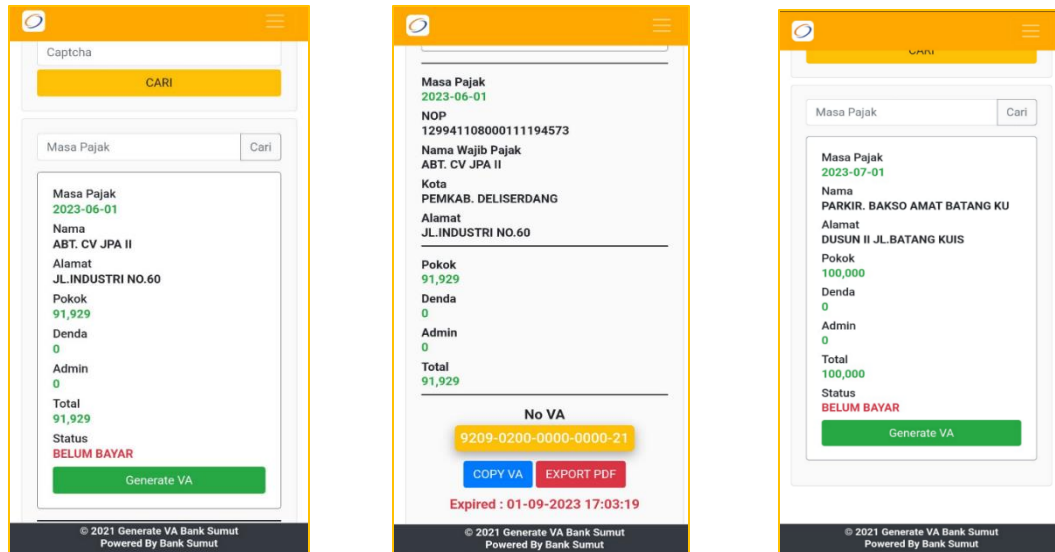


- Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam hal penagihan tunggakan Pajak Daerah serta Kantor Pertanahan untuk ZNT PBB-P2;
- Meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta upaya penanganan piutang PBB-P2 dengan penghapusan denda dan penghapusbukuan piutang pada Kategori K-1;





- Pengembangan aplikasi terintegrasi dan membuka informasi dan kanal pembayaran secara online agar mudah diakses secara luas, dalam hal ini aplikasi e-PADI berbasis android sudah dikembangkan untuk pembayaran pajak daerah lainnya selain PBB P2. Sehingga masyarakat bisa membayar pajak daerah tanpa antri di Bank Sumut, bisa melakukan cek pembayaran pajak daerah dan besar nilai pajak daerahnya.



- Pemasangan alat rekam transaksi usaha atau disebut tapping box yang bekerja sama dengan Bank Sumut untuk jenis Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir sejumlah 87 objek pajak yang sudah dipasang alat Tapping Box.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atau penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100%	62,91%	62,91%	16.433.750.074	15.145.453.851	92,16 %	-46,49 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 poin	81,87 poin	102,34 %	5.069.714.160	4.349.127.175	85,79 %	16,17 %
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	71 poin	70,91 poin	99,87 %	41.720.894.545	39.609.294.266	94,94 %	4,94 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah



Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left[\frac{1 - \text{RAK ke } i / \text{RVK ke } i}{\text{PAK ke } i / \text{TVK ke } i} \right]}{n} \times 100\%$$

Sumber : PMK No. 249/PMK.02/2011

Keterangan :

E = Efisiensi

RAK = Realisasi Anggaran Keluaran

RVK = Realisasi Volume Keluaran

PAK = Pagu Anggaran Keluaran

TVK = Target Volume Keluaran

Maka, hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pada Bapenda :

$$E = \frac{\left[1 - \frac{15.145.453.851 / 62,91}{16.433.750.074 / 100} \right] \times 100\% + \left[1 - \frac{4.349.127.175 / 81,87}{5.069.714.160/80} \right] \times 100\% + \left[1 - \frac{39.609.294.266/70,91}{41.720.894.545/71} \right] \times 100\%}{3}$$

$$= \frac{\left[1 - \frac{240.747.955}{164.337.501} \right] \times 100\% + \left[1 - \frac{54.194.731}{63.371.427} \right] \times 100\% + \left[1 - \frac{39.609.294.266}{41.720.894.545} \right] \times 100\%}{3}$$

$$= \frac{-46,4961 + 16,1730 + 4,9407}{3}$$

$$= -8,46 \%$$

Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) rasio efisiensi juga dapat dilihat dari biaya pemerolehan PAD dibandingkan dengan jumlah realisasi penerimaan PAD, dengan formulasi :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel 3.11 Tabel Efisiensi Keuangan Daerah Otonom

KEMAMPUAN KEUANGAN	RASIO EFISIEN (%)	SUMBER DATA
Sangat Efisien	< 10	<i>Mahmudi (2010)</i>
Efisien	10 - 20	
Cukup Efisien	21 - 30	
Kurang Efisien	31 - 40	
Tidak Efisien	> 40	



Maka, rasio efisiensi PAD Bapenda 2023 dari sektor pajak daerah dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi PAD} &= \frac{59.103.875.292,-}{797.734.218.178,-} \\ &= 7,41 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa rasio efisiensi PAD Bapenda sebesar 7,41%.

Dengan rasio <10% maka efisiensi keuangannya dapat dikategorikan sangat efisien.

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel berikut ini :



Tabel 3.12 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	99,87 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LHE AKIP	99,87		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	100		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	100		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79,52	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2 dan Stimulus untuk Pencapaian Sasaran Strategis 1
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83,08	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	102,34 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	102.34		



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	100		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	100		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	89,55	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Tidak Menunjang Langsung	



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

							Pencapaian Sasaran	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101,19	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	100		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	93,04	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	100		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	97,33	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53,85	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Tidak Menunjang	



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

					yang Disediakan		Langsung Pencapaian Sasaran	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	100		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	70	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	62,91 %	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	62.91		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	100		
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	44,44	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak	175,39	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	425,99	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	270,48	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	97,01	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	84,18	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	95,04	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	67,13	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	76,67	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Penendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	79,25	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	55,21	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1

Sumber : Badan Pendapatan Daerah



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Sasaran strategis tahun 2023 ada yang sudah tercapai dan ada yang tidak tercapai. Dari 2 (dua) sasaran tersebut capaian tertinggi adalah sasaran ke-2 meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja, didukung 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan capaian indikator sasaran untuk Indeks Kepuasan Masyarakat telah tercapai 102,34% sedangkan untuk Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah tercapai 99,87%.

Sasaran yang tidak tercapai yaitu meningkatnya penerimaan pajak daerah yang didukung 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Berbagai upaya telah dilakukan melalui pemutakhiran data dengan pendataan potensi Pajak Daerah melalui aplikasi e-PADI terintegrasi, melakukan penegakan hukum dan sanksi sosial bagi wajib pajak penunggak melalui penempelan stiker serta pembongkaran reklame, melaksanakan pemantauan kepatuhan wajib pajak dengan kegiatan penongkrongan di objek pajak daerah, penyampaian surat pemberitahuan tunggakan pajak, melakukan penagihan aktif ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pendataan PBB dengan adanya penambahan bangunan, melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam hal penagihan tunggakan pajak daerah serta Kantor Pertanahan untuk ZNT PBB-P2, penanganan piutang PBB-P2 dengan penghapusan denda dan penghapusbukuan piutang pada Kategori K-1, pengembangan aplikasi terintegrasi dan membuka informasi dan kanal pembayaran secara online agar mudah diakses secara luas, penambahan pemasangan alat rekam data transaksi usaha (tapping box) baik secara sewa maupun bekerja sama dengan PT. Bank Sumut.



3.2 Realisasi Anggaran

Untuk realisasi anggaran merupakan serapan anggaran pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.13 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran	% Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.790.608.705,-	43.958.421.441,-	93,95	101,11
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.828.640,-	55.725.000,-	88,69	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.658.065.905,-	39.553.569.266,-	94,95	100
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.250.000,-	64.152.000,-	94,00	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.504.857.652,-	1.965.811.401,-	78,48	100
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	460.263.600,-	445.100.000,-	96,71	100
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.167.678.908,-	1.036.040.992,-	88,73	100
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	868.664.000,-	838.022.782,-	96,47	100
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	16.433.750.074,-	15.145.453.851,-	92,16	62,91
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	16.433.750.074,-	15.145.453.851,-	92,16	100

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Terlihat pada tabel di atas, bahwa serapan anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ke-2 meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 93,95%. Dengan struktur tersebut, untuk kegiatan yang mendukung langsung pencapaian sasaran strategis terealisasi 11,77% dari jumlah realisasi anggaran, selebihnya merupakan gaji dan tunjangan sebesar 88,23%. Sedangkan untuk pencapaian kinerja sasaran ke-1 meningkatnya penerimaan pajak daerah melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah serapan anggarannya sebesar 92,16%.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023. Penyusunan LKIP ini memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 1 (satu) sasaran strategis tercapai dengan kategori sangat tinggi dan 1 (satu) capaian sasaran strategis dengan kategori rendah.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah antara lain belum tergalinya semua potensi pajak daerah, kurangnya kesadaran wajib pajak membayar pajak, belum adanya reward dan punishment bagi wajib pajak, penagihan piutang masih belum maksimal, dan data subjek dan objek pajak belum akurat.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Perbup dan SOP berdasarkan Perda yang baru sesuai Undang-undang HKPD;
2. Sosialisasi Perda terbaru dan edukasi/penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak;
3. Melaksanakan penggalian potensi pajak daerah;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penagihan piutang;
5. Monitoring pembayaran dengan pemantauan data dan uji kepatuhan wajib pajak;
6. Melakukan pembaruan sistem dengan aplikasi Geografis Sistem Informasi (GIS) PBB berbasis web yang modern dan dengan teknologi terkini;
7. Melakukan pemutakhiran data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
8. Relaksasi pajak daerah untuk memberikan ruang pemahaman bagi wajib pajak dalam masa transisi aturan yang lama dengan yang baru;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pendapatan Daerah kepada pihak-pihak terkait baik dengan *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah berperan aktif untuk membangun Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam,
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Drs. HENDRA WIJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691213 199010 1 002**



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pendapatan Daerah kepada pihak-pihak terkait baik dengan *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah berperan aktif untuk membangun Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam,

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**



**Drs. HENDRA WIJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691213 199010 1 002**



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si**
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ASHARI TAMBUNAN**
Jabatan : BUPATI DELI SERDANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

ASHARI TAMBUNAN

Lubuk Pakam, 2023
Pihak Pertama

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
NIP. 19710616 199803 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Poin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	71 Poin

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.576.831.072	APBD
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	16.454.636.972	APBD

Lubuk Pakam, 2023

Bupati Deli Serdang

ASHARI TAMBUNAN

Pt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
NIP. 19710616 199803 1 009



MATRIKS RENSTRA

MATRIKS RENSTRA
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Data Capaian pada tahun Awal	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggungja wab	Lokasi dan Kelompok sasaran
								Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)			
I	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	-	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	5%		5%		5%		5%		5%		25%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	-	-	-	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah		100%	10567	100%	13499	100%	16180	100%	16398	100%	16758	100%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	10567	100%	13499	100%	16180	100%	16398	100%	16758	100%	Kabid Pajak Daerah, Kabid PBB, Kabid BPHTB dan Kabid Renbang	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Data Potensi Pajak Daerah		2639 WP	0	2954 WP	0	0	0	3368 WP	27	3617 WP	28		Kasubbid Perencanaan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kebijakan Pajak Daerah yang disusun		4 Kebijakan	0	5 Kebijakan	574	7 Kebijakan	58	7 Kebijakan	63	7 Kebijakan	65		Kasubbid Pengembangan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah		0	60 Orang	5085	500 Orang	273	500 Orang	353	500 Orang	364			Kasubbid Perencanaan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		5 Jenis	122	6 Jenis	0			8 Jenis	440	9 Jenis	453		Kasubbid Pajak Daerah, PBB, BPHTB dan Renbang	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Daerah Baru yang Terdata		338 WP	3708	363 WP	0	363 WP	6199	438 WP	6920	481 WP	7,128		Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah		3 Aplikasi	221	4 Aplikasi	578	4 Aplikasi	646	4 Aplikasi	217	4 Aplikasi	224		Kasubbid Pengembangan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.07	Penetapan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak PBB yang Terdata dan Dinilai		15953 OP PBB	0	16112 OP PBB	887	16134 OP PBB	685	17375 OP PBB	564	18195 OP PBB	581		Kasubbid Pendataan dan Penilaian PBB	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah yang Ditetapkan	Jumlah WP Pajak Daerah yang Ditetapkan		2456 WP	554	2456 WP	6244	2491 WP	114	2493 WP	675	2516 WP	695		Kasubbid Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah WP yang Terlayani		34031 WP	0	35119 WP	0	35119 WP	98	38355 WP	130	40175 WP	134		Kasubbid Penagihan dan Pembukuan BPHTB	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Verifikasi dan Validasi		18078 WP	629	18985 WP	0	18985 WP	623	20980 WP	669	21980 WP	689		Kasubbid Verifikasi dan Validasi BPHTB	Kab. Deli Serdang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Data Capaian pada tahun Awal	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggungja wab	Lokasi dan Kelompok sasaran
								Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)			
				5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP yang Tertagih		418945 WP	5219	442139 WP	131	449671 WP	6272	505617 WP	5978	537939 WP	6,157		Kasubbid Penagihan dan Pembukuan Pajak PBB	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah SPPT dan WP Keberatan		411377 WP	0	431975WP	0	431975 WP	591	466975 WP	25	486975 WP	26		Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Data Evaluasi & Pelaporan Pajak Daerah		12 Bulan	114	12 Bulan	0	12 Bulan	544	12 Bulan	105	12 Bulan	108		Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Data Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi		12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	76	12 Bulan	232	12 Bulan	107		Kasubbid Retribusi Daerah & Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintahan Propinsi	Kab. Deli Serdang
II	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	77 poin		78 poin		79 poin		80 poin		81 poin	-	81 poin	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
		Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	77 poin		78 poin		79 poin		80 poin		81 poin	-	81 poin	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	3623	100%	3427	100%	5035	100%	5503	100%	5907	100%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	22	100%	75	100%	194	100%	194	100%	200	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas		110 Stel	22	0	75	100 Stel	194	110 Stel	194	110 Stel	200		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedinasan		100%	1738	100%	1296	100%	2421	100%	2643	100%	2722	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor		3 Jenis	2	3 Jenis	14	2 Jenis	13	3 Jenis	15	3 Jenis	15		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10 Jenis	501	10 Jenis	157	10 Jenis	503	10 Jenis	496	10 Jenis	511		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		17 Jenis	397	17 Jenis	339	17 Jenis	346	17 Jenis	362	17 Jenis	373		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		4 Jenis	213	4 Jenis	22	5 Jenis	147	5 Jenis	181	5 Jenis	186		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggungja wab	Lokasi dan Kelompok sasaran
								Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)			
				5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		4020 eks	45	4020 eks	53	4020 eks	53	4020 eks	53	4020 eks	55		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Bahan Makanan dan Minuman TamU		7 jenis	97	7 jenis	16	7 jenis	55	7 jenis	51	7 jenis	53		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		815 OH	483	815 OH	695	815 OH	1305	815 OH	1485	815 OH	1,530		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah		100%	8	100%	0	100%	373	100%	560	100%	816	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan			0		0			2 Unit	54	2 Unit	300		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		5 Jenis	8	5 Jenis	0	5 Jenis	373	5 Jenis	332	5 Jenis	342		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								8 Unit	174	8 Unit	174		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1230	100%	1151	100%	1129	100%	1248	100%	1285	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadaan Materai		1400 Buah	8	2000 Buah	14	2000 Buah	20	2000 Buah	20	2000 Buah	21		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon/Internet, Air dan Listrik		3 Jenis	731	3 Jenis	554	3 Jenis	556	3 Jenis	577	3 Jenis	594		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		50 Unit	103	50 Unit	28	180 Unit	138	50 Unit	253	50 Unit	261		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Petugas Kebersihan dan Keamanan		130 OB	388	130 OB	555	130 OB	415	130 OB	398	130 OB	410		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		90%	625	90%	905	100%	920	90%	858	90%	884	90%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Data Capaian pada tahun Awal	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggungja wab	Lokasi dan Kelompok sasaran
								Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)			
				5.02.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara		20 Unit	595	20 Unit	674	20 Unit	748	21 Unit	782	21 Unit	805		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang Terpelihara		1100 m ²	30	1100 m ²	174	1100 m ²	172	1100 m ²	58	1100 m ²	60		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara		3 Jenis	0	3 Jenis	57			3 Jenis	18	3 Jenis	19		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah					70 poin		72 poin		74 poin		76 poin		78 poin	78 poin		Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	38339	100%	37571	100%	38857	100%	39765	100%	40958	100%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	0	100%	0	100%	53	100%	68	100%	70	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan		2 Jenis	0	2 Jenis	0	2 Jenis	32	2 Jenis	40	2 Jenis	41		Kasubbag Program	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen / Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah		1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	22	1 Dokumen	28	1 Dokumen	29		Kasubbag Program	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	38339	100%	37571	100%	38804	100%	39697	100%	40888	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		135 OB	37896	104 OB	37108	132 OB	38070	135 OB	39000	135 OB	40,170		Kasubbag Keuangan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan		135 OB	371	135 OB	218	132 OB	445	132 OB	411	132 OB	423		Kasubbag Keuangan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		45 Set	72	45 Set	245	45 Set	289	45 Set	286	45 Set	295		Kasubbag Keuangan	Kab. Deli Serdang



MATRIKS PERUBAHAN RENSTRA



Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN-2021		TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		Target	Rp (dalam juta)			
						Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)					
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			37.571	70,01	39.099	71,00	38.283	72,00	40.198	72,00	40.198	Bape nda	Kab. Deli Serdang	
		5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	-	100	41	100	69	100	72	100	72	Bape nda	Kab. Deli Serdang	
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	2	-	5	25	5	40	5	43	5	43	Bape nda	Kab. Deli Serdang	
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	1	-	2	16	2	28	2	29	2	29	Bape nda	Kab. Deli Serdang	
		5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	37.751	100	39.058	100	38.215	100	40.125	100	40.125	Bape nda	Kab. Deli Serdang	
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	104	37.108	1428	38.367	1680	37.477	1680	39.351	1680	39.351	Bape nda	Kab. Deli Serdang	



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

		5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	144	218	130	444	130	452	140	475	140	475	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	45	245	1	247	1	286	1	300	1	300	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat			3.427	79	6.046	80	5.293	81	5.897	81	5.897	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	75	100	194	100	75	100	78	100	78	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	115	75	4	194	1	75	1	78	1	78	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	1.296	100	2.927	100	2.608	100	2.738	100	2.738	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	3	14	3	14	4	15	4	16	4	16	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	13	157	19	666	21	470	20	493	20	493	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	16	339	19	346	34	355	34	373	34	373	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	5	22	9	188	9	180	9	189	9	189	Bape nda	Kab. Deli Serdang



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%	4020	53	4020	53	4020	53	4050	55	4050	55	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	7	16	12	55	12	51	12	54	12	54	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	114	695	84	1.602	84	1.483	88	1.557	88	1.557	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	-	100	925	100	507	100	843	100	843	Bape nda	Kab. Deli Serdang
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	1	-	1	281	1	-	1	310	1	310	Bape nda	Kab. Deli Serdang
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	-	-	1	275	-	-	2	-	2	-	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	5	-	143	370	154	332	160	349	160	349	Bape nda	Kab. Deli Serdang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	-	-	8	175	10	184	10	184	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	1.151	100	1.083	100	1.245	100	1.041	100	1.041	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2.000	14	500	10	375	17	390	18	390	18	Bape nda	Kab. Deli Serdang



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	3	554	25	556	24	577	24	606	24	606	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	40	28	206	143	98	253	150	-	150	-	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	130	555	40	374	42	397	45	417	45	417	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta	100%	90	905	90	917	90	858	90	1.197	90	1.197	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	20	674	20	746	21	782	21	821	21	821	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	-	-	-	-	-	-	150	265	150	265	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	100%	-	-	-	-	-	-	1	30	1	30	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	1.100	174	1	171	1	58	1	61	1	61	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	3	57	-	-	30	18	47	19	47	19	Bape nda	Kab. Deli Serdang



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%	100	13.499	100	15.780	100	16.455	100	18.253	100	18.253	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100	13.499	100	15.780	100	16.455	100	18.253	100	18.253	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	2.954	-	-	2	24	2	26	2	26	Bape nda	Kab. Deli Serdang	
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100%	5	574	8	57	10	62	10	69	10	69	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%	60	5.085	2	442	8	448	8	498	8	498	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	6	-	35	339	33	440	12	488	12	488	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100%	363	-	17307	6.078	17430	6.864	17547	7.620	17547	7.620	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%	4	578	19800	391	20725	290	21550	322	21550	322	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100%	16.112	887	60	1.219	2500	553	5000	614	5000	614	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100%	2.456	6.244	455987	115	456587	654	517187	718	517187	718	Bape nda	Kab. Deli Serdang



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	35.119	-	62540	89	63560	121	64631	135	64631	135	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100%	18.985	-	50873	546	56883	658	62949	730	62949	730	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100%	442.139	131	473835	5.614	505617	5.978	537939	6.636	537939	6.636	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100%	431.975	-	50	535	30	26	20	29	20	29	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	12	-	17083	279	18051	82	19098	90	19098	90	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	12	-	384	74	384	232	384	246	384	246	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100%	12	-	12	-	12	21	12	31	12	31	Bape nda	Kab. Deli Serdang
							54.677		60.925		60.031		64.348		64.348		



REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TA 2023**

NO	JENIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH	P. APBD 2023	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2023	%	CARA PERHITUNGAN	HASIL
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7
1.	Pajak Hotel	10.000.000.000	9.093.789.233	90,94	$9.093.789.233 \times 100\% =$	90,94%
					10.000.000.000	
2.	Pajak Restoran	49.142.500.000	43.622.306.334	88,77	$43.622.306.334 \times 100\% =$	88,77%
					49.142.500.000	
3.	Pajak Hiburan	9.980.000.000	8.320.462.550	83,37	$8.320.462.550 \times 100\% =$	83,37%
					9.980.000.000	
4.	Pajak Reklame	20.125.000.000	11.364.920.136	56,47	$11.364.920.136 \times 100\% =$	56,47%
					20.125.000.000	
5.	Pajak Penerangan Jalan	295.000.000.000	213.042.327.681	72,22	$213.042.327.681 \times 100\% =$	72,22%
					295.000.000.000	
6.	Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.000.000.000	2.564.438.695	16,03	$2.564.438.695 \times 100\% =$	16,03%
					16.000.000.000	
7.	Pajak Parkir	18.345.000.000	11.309.022.817	61,65	$11.309.022.817 \times 100\% =$	61,65%
					18.345.000.000	
8.	Pajak Air Tanah	20.700.000.000	10.579.516.910	51,11	$10.579.516.910 \times 100\% =$	51,11%
					20.700.000.000	
9.	Pajak Sarang Burung Walet	3.086.250.000	7.100.000	0,23	$7.100.000 \times 100\% =$	0,23%
					3.086.250.000	
10.	PBB Perkotaan dan Pedesaan	565.704.443.305	220.558.219.773	38,99	$220.558.219.773 \times 100\% =$	38,99%
					565.704.443.305	
	- Pokok PBB Tahun Berjalan	302.485.171.250	194.896.753.949	64,43	$194.896.753.949 \times 100\% =$	64,43%
					302.485.171.250	
	- Pokok Piutang PBB	263.219.272.055	25.661.465.824	9,75	$25.661.465.824 \times 100\% =$	9,75%
					263.219.272.055	
11.	Pajak BPHTB	260.000.000.000	267.272.114.049	102,80	$267.272.114.049 \times 100\% =$	102,80%
					260.000.000.000	
	TOTAL PAJAK DAERAH	1.268.083.193.305	797.734.218.178	62,91	$797.734.218.178 \times 100\% =$	62,91%
					1.268.083.193.305	

Labuk Pakam, 2024
**Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Deli Serdang**

Drs. HENDRA WIJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691213 199010 1 002



NILAI IKM BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2023

TRIWULAN	NILAI
I	81,07
II	81,14
III	80,25
IV	85,00
IKM TAHUN 2023	81,87

Lubuk Pakam, Februari 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG



Drs. HENDRA WIJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691213 199010 1 002



LHE SAKIP BADAN PENDAPATAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
INSPEKTORAT

Jalan Mawar Nomor 06 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514
Telepon (061) - 7951646 Faks. (061) - 7951646
E-mail : inspektoratdeliserdang@gmail.com

Lubuk Pakam, 15 Agustus 2023

Nomor : 700.1.2.1 / LHE. SAKIP. 36.44 / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Deli Serdang Tahun 2022**

Kepada

**Yth. Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Deli
Serdang**

Di-

Lubuk Pakam

Tim Evaluasi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dengan berpedoman pada Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor : 094/DD/111/2023 tanggal 15 Juni 2023.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang

3. PENUTUP

a. Simpulan


Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 masuk dalam kategori **sangat baik** dengan **predikat BB (70,91)**. Meski sudah mendapat kategori sangat baik, namun masih ada beberapa komponen yang harus diperbaiki, seperti Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik.



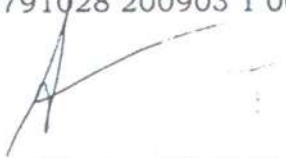

Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Apresiasi dan Penghargaan atas upaya dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENGETAHUI :
INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG


H. EDWIN NASUTION, SH., M.Si, CGSAE,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 199803 1 010

TIM PEMERIKSA :

- 
1. Gita Priscilla Pinem, SH, M.Hum
NIP. 19820312 200502 2 002
- 
2. Ahmad Rifana Pasaribu, ST, M.Si
NIP. 19791028 200903 1 003
- 
3. Anwar S. Siregar, SE, M.Si
NIP. 19820113 200904 1 002
- 
4. J.T Hartoyo S. Nadeak, SSTP
NIP. 19931003 201708 1 001

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang



TINDAK LANJUT LHE SAKIP TAHUN 2022

**TANGGAPAN/TINDAKLANJUT LHE SAKIP
TAHUN 2022**

NO	REKOMENDASI TA 2022	TINDAK LANJUT
a.	Perencanaan Kinerja	
1	Mempertahankan kualitas perencanaan selama 1 (satu) tahun terakhir.	Bapenda tetap mempertahankan kualitas perencanaan dan meningkatkannya dengan perubahan dokumen Renstra 2019-2024 dan menyesuaikan pada Renja serta Perjanjian Kinerja 2023.
2	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja ke website OPD tepat waktu.	Dokumen perencanaan kinerja seperti Renstra, Renja 2023 telah dipublikasikan ke website Bapenda tepat waktu.
3	Menyelaraskan Tujuan/Sasaran dalam dokumen Renstra dengan dokumen Renja.	Tujuan/sasaran pada dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 sudah selaras dengan dokumen Renja.
4	Memperbaiki ukuran keberhasilan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART.	Ukuran keberhasilan indikator kinerja pada Renstra Perubahan 2019-2024 telah memenuhi kriteria SMART.
5	Memperbaiki IKU yang tidak sepenuhnya dapat dicapai.	Target kinerja IKU yang tidak dapat dicapai telah disesuaikan pada dokumen Renstra Perubahan 2019-2024.
6	Memperbaiki target ditetapkan yang tidak sepenuhnya dapat dicapai.	Target kinerja yang tidak dapat dicapai telah disesuaikan pada dokumen Perubahan Renstra 2019-2024.
7	Menyajikan informasi cascading pada dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target, Pagu dan Penanggung Jawab.	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target, Pagu dan Penanggung Jawab telah dimasukkan dalam tabel 6.1 Perubahan Renstra 2019-2024.
8	Menyajikan Informasi tentang isu Strategis, Strategi dan Kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran (Pohon Kinerja) dan informasi aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting/silang manajemen) pada dokumen perencanaan.	Isu Strategis, Strategi dan Kebijakan telah dijelaskan dalam Perubahan Renstra dan pohon kinerja serta crosscuttingnya telah dilampirkan dalam Perubahan Renstra 2019-2024.
9	Menetapkan target yang dapat tercapai dengan baik.	Target kinerja telah disesuaikan pada Perubahan Renstra 2019-2024.
10	Memantau kemajuan capaian target dalam rencana aksi secara periodik dengan memberikan reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.	Capaian target untuk pajak daerah dipantau setiap hari dengan adanya Laporan Harian Penerimaan Pajak Daerah, untuk IKM dan realisasi kinerja pegawai dilakukan setiap triwulan.
11	Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja secara menyeluruh dari hasil evaluasi tahun sebelumnya.	Dokumen perencanaan kinerja seperti Renstra, Renja 2023 telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi tahun sebelumnya.
12	Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja namun belum sepenuhnya mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	Dengan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja diharapkan mencapai hasil yang lebih baik.

NO	REKOMENDASI TA 2022	TINDAK LANJUT
b. Pengukuran Kinerja		
1	Mempertahankan kualitas pengukuran kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir.	Bapenda tetap mempertahankan kualitas pengukuran kinerja dan meningkatkannya dengan adanya SOP pengukuran kinerja dan realisasi perjanjian kinerja setiap triwulan.
2	Mengumpulkan data kinerja yang sepenuhnya relevan dan mendukung capaian kinerja.	Pengumpulan data kinerja dilakukan setiap triwulan dengan realisasi perjanjian kinerja untuk mendukung capaian kinerja.
3	Mempedomani pengukuran kinerja (individu dan organisasi) dalam pemberian reward and punishment serta penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.	Mempedomani SOP pengukuran kinerja dalam pengukuran kinerja individu dan OPD.
4	Mempedomani pengukuran kinerja dalam penyesuaian (refocusing) Organisasi, penyesuaian Strategi, penyesuaian Kebijakan, penyesuaian Aktivitas, penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.	Realisasi penerimaan harian pajak daerah, laporan evaluasi renja sebagai tolok ukur dalam pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan serta anggaran yang dibutuhkan agar target kinerja tercapai.
5	Melakukan efisien penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dalam pencapaian kinerja, tercantum dalam LKIP 2023.
c. Pelaporan Kinerja		
1	Mempertahankan kualitas dokumen pelaporan selama 1 tahun terakhir.	Bapenda tetap mempertahankan kualitas dokumen pelaporan dan meningkatkannya.
2	Mengadakan upaya-upaya inovatif serta layak menjadi percontohan.	Upaya-upaya inovatif telah dilakukan dengan memperoleh juara I Inovasi Daerah Kabupaten Deli Serdang.
3	Menyajikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dalam dokumen LKIP.	Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan telah disajikan dalam LKIP 2023.
4	Memanfaatkan Informasi LKIP sebagai perhatian utama pimpinan.	Informasi LKIP dijadikan acuan oleh pimpinan untuk perbaikan ke depannya.
5	Menyajikan informasi LKIP kepada seluruh pegawai.	Dokumen LKIP dibagikan ke setiap bidang pada Bapenda untuk diketahui seluruh pegawai.
6	Memanfaatkan informasi LKIP dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	Informasi LKIP dijadikan acuan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk tahun selanjutnya.
7	Memanfaatkan informasi LKIP dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	Informasi LKIP sebagai evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
8	Memanfaatkan informasi LKIP dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Informasi LKIP dijadikan acuan dalam penyusunan renja tahun selanjutnya.
9	Memanfaatkan informasi LKIP dalam mempengaruhi perubahan budaya kinerja Organisasi.	Informasi LKIP dijadikan acuan seluruh pegawai agar meningkatkan budaya kinerja Bapenda.

NO	REKOMENDASI TA 2022	TINDAK LANJUT
d.	Evaluasi Akuntabel Kinerja Internal	
1	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Seluruh rekomendasi evaluasi AKIP telah ditindaklanjuti.
2	Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Implementasi SAKIP atas rekomendasi telah ditindaklanjuti dan ditingkatkan.
3	Memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Hasil Evaluasi AKIP sebagai acuan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4	Memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Hasil Evaluasi AKIP sebagai acuan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
5	Memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.	Hasil Evaluasi AKIP sebagai acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Lubuk Pakam,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

